



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 12 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SRI TANJUNG, DESA PANCUR JAYA,
DESAPANGKALAN PINANG DAN DESA DUNGUN BARU KECAMATAN RUPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Pinang dan Desa Dungun Baru di Kecamatan Rupat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SRI TANJUNG, DESA PANCUR JAYA, DESA PANGKALAN PINANG DAN DESA DUNGUN BARU KECAMATAN RUPAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Pinang dan Desa Dungun Baru Kecamatan Rupert, dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Desa Sri Tanjung merupakan pemekaran dari Desa Teluk Lecah.
- (2) Desa Sri Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Tanjung Sialang dan Dusun Tanjung Jering.
- (3) Desa Sri Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 30 (tiga puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Sri Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Lecah;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarjo Mesim;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Lecah; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Sri Tanjung, luas wilayah Desa Teluk Lecah dikurangi dengan luas wilayah Desa Sri Tanjung.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Sri Tanjung, jumlah penduduk Desa Teluk Lecah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Sri Tanjung.

Pasal 4

- (1) Desa Pancur Jaya merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan Nyirih.
- (2) Desa Pancur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pancur.
- (3) Desa Pancur Jaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 13 (tiga belas) Kilometer persegi.
- (4) Desa Pancur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Nyirih;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Kebumen;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dungun Baru; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Cingam.

Pasal 5

- (1) Desa Pangkalan Pinang merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan Nyirih.
- (2) Desa Pangkalan Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Gonyeh.
- (3) Desa Pangkalan Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 6,8 (enam koma delapan) kilometer persegi.
- (4) Desa Pangkalan Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hutan Panjang;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Selat Morong/Desa Hutan Panjang/Desa Pancur Jaya;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutan Panjang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Nyirih.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa Pancur Jaya dan Desa Pangkalan Pinang, luas wilayah Desa Pangkalan Nyirih dikurangi dengan luas wilayah Desa Pancur Jaya dan luas wilayah Desa Pangkalan Pinang.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pancur Jaya dan Desa Pangkalan Pinang, jumlah penduduk Desa Pangkalan Nyirih dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pancur Jaya dan jumlah penduduk Desa Pangkalan Pinang.

Pasal 7

- (1) Desa Dungun Baru merupakan pemekaran dari Desa Hutan Panjang.
- (2) Desa Dungun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Tanah Runtuh, Dusun Dungun Baru, Dusun Sungai Kolam dan Dusun Sungai Pak Cut.
- (3) Desa Dungun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 40 (empat puluh) kilometer persegi.
- (4) Desa Dungun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hutan Panjang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pergam, Desa Sukarjo Mesim dan Desa Teluk Lecah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pancur Jaya dan Desa Parit Kebumen.

- (5) Dengan dibentuknya Desa Dungun Baru, luas wilayah Desa Hutan Panjang dikurangi dengan luas wilayah Desa Dungun Baru.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Dungun Baru, jumlah penduduk Desa Hutan Panjang dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Dungun Baru.

Pasal 8

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4), dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 10

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun. dan
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Mengangkat Perangkat Desa
- b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- c. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

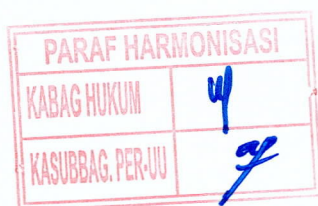
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH



Diundangkan Bengkalis

pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

[Signature]

Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 12 Tahun 2012
TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SRI TANJUNG, DESA PANCUR JAYA, DESA PANGKALAN
PINANG DAN DESA DUNGUN BARU KECAMATAN RUPAT**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Pinang dan Desa Dungun Baru Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkulu maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
